
**KAJIAN PENERAPAN EKONOMI SOSIALIS VS EKONOMI PANCASILA:
KEADAAN EKONOMI INDONESIA MENUJU SOCIETY 5.0****Berladyna Ginonika¹, Maria Alicia Pramesti²**Universitas Sebelas Maret¹²E-mail : berladyn136@gmail.com¹ , aliciapramesti.17@gmail.com²**ABSTRACT**

The birth of socialist economic thought by Karl Max, as a reaction to free capitalist thought. Socialist economics itself is an economic system that is centered on the government. The economic activities of the Indonesian people are based on the Pancasila economic system, which is an economic system born by the founders of the country and is often referred to as a "self-system". Pancasila still has an existence in every development of the era, such as the current issue of globalization which is a new challenge for the existence of Pancasila values. Globalization brings various new challenges in Indonesia, one of which is the competition for Human Resources (HR) capabilities. Competition for the world of work is currently not only between local regions, but also between countries. Globalization also has an impact on technological developments, seen in the emergence of the industrial revolution 4.0 and also Society 5.0. The purpose of this study is to determine the socialist economy vs. the Pancasila economy and the values of Pancasila facing society 5.0. This research method uses descriptive methods and qualitative analysis. The results of this study show that the relevance of Pancasila is very clear in the development of the industrial revolution 4.0 and Society 5.0, because the goal of this development is to integrate human power with technology.

Keyword: Socialist Economy, Pancasila Economy, Society 5.0**ABSTRAK**

Lahirnya pemikiran ekonomi sosialis oleh Karl Max, sebagai reaksi dari pemikiran kapitalis yang bebas. Ekonomi sosialis sendiri adalah sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah.. Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia yang berpaku pada sistem ekonomi Pancasila yang mana adalah sistem perekonomian yang lahir oleh para pendiri negara dan sering disebut sebagai “sistem sendiri”. Pancasila tetap memiliki eksistensi disetiap perkembangan jaman, seperti yang saat ini terjadi isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia, salah satunya adalah persaingan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi, terlihat munculnya revolusi industry 4.0 dan juga Society 5.0. tujuan penelitian ini untuk mengetahui ekonomi sosialis vs ekonomi Pancasila serta nilai – nilai Pancasila menghadapi society 5.0. metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industry 4.0 dan Society 5.0, karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi

Kata kunci: Ekonomi Sosialis, Ekonomi Pancasila, Society 5.0

PENDAHULUAN

Lahirnya pemikiran ekonomi sosialis oleh Karl Max, sebagai reaksi dari pemikiran kapitalis yang bebas. Ekonomi sosialis sendiri adalah sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah. Dimana setiap aktivitas yang dilakukan diatur dan dibatasi oleh negara. Di awal-awal pertumbuhannya, sistem ekonomi sosialis diorganisir seperti piramida, dengan kepemimpinan partai dan pemerintah berada di puncak, perusahaan dan swasta berada di tahapan dasar, sementara kementerian untuk sektor-sektor tertentu menguasai lapisan pertengahan. Model organisasi komando kemudian secara teratur mengalami perubahan terutama pada lapisan bawah dan tengah, perusahaan dan kementerian, kadang dipisah kemudian digabungkan. Pada kesempatan yang lain, lapisan bawah dialihkan dari pelayanan satu menteri kepada yang lain, fungsi-fungsinya didistribusikan lagi antar staf dan jajaran departemen-departemen. Perubahan-perubahan itu dilakukan mengingat arti penting reformasi ekonomi dalam perumusan dan implementasi sistem ekonomi sosialis komando. Ekonomi sosialis ini diterapkan dan diikuti oleh beberapa negara yang menganut paham komunis yaitu China dan Korea Utara. Ekonomi sosialis sangatlah tidak memiliki kecocokan untuk diterapkan di Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang mana suara rakyat adalah penentu dari lahirnya kebijakan.

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan ideology Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar masyarakat Indonesia untuk melakukan setiap aktivitas masing-masing pribadi. Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia yang berpaku pada sistem ekonomi Pancasila yang mana adalah sistem perekonomian yang lahir oleh para pendiri negara dan sering disebut sebagai “sistem sendiri”. Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang berisi nilai-nilai sebagai landasan budaya bangsa, nilai-nilai tersebut merupakan bentuk dari keinginan bangsa dan merupakan bentuk ideologi Indonesia. Pancasila kerap kali dikelompokkan ke dalam ideologi tengah karena sifatnya bukan termasuk kedua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh (Wulandari & Dewi, 2021). Pendidikan yang didasarkan Pancasila serta undang-undang Dasar 1945 yang berakar pada agama, budaya, nilai-nilai Pancasila, dan tanggap akan perubahan jaman dengan tujuan menambah kualitas manusia adalah Pendidikan Nasional. Bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan memiliki fungsi penting di negara Indonesia sebagai jati diri Indonesia, filsafat negara, dan asas persatuan Indonesia.

Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini, dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam lima sila

tersebut. Karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila harus diamankan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi disetiap perkembangan jaman, seperti yang saat ini terjadi isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia, salah satunya adalah persaingan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara hard skill dan soft skill yang menjadi global. Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi, terlihat munculnya revolusi industry 4.0 dan juga Society 5.0. Dalam perkembangan zaman, yang sebelumnya merupakan era revolusi industry 4.0 yang akan meningkat pada society 5.0., memberikan dorongan kepada setiap sistem ekonomi untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

LITERATUR REVIEW

1. Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Sistem perekonomian sosialis merupakan system perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi (Effendi, 2019). Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi tetapi sangat terbatas, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas, pemerintah memiliki peran sangat besar, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi, hak milik individu tidak diakui (Tho'in, 2015)

Kaum sosialisme mengatakan bahwa sistem mereka akan membentuk distribusi pendapatan secara lebih merata. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa hak milik negara atas alat pokok produksi dapat menghapuskan apa yang disebut pendapatan yang diterima tanpa kerja oleh orang-orang swasta. Bunga, sewa dan laba diberikan kepada pemerintah. Dalam sosialisme, industri tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi seperti yang terjadi dalam kapitalisme, tetapi dimiliki oleh suatu

organisasi umum walaupun masih terjadi pertentangan di kalangan mereka tentang bentuk organisasi.

Menurut Rifdoisme dalam artikelnya Perbandingan Sistem Ekonomi mengatakan sosialisme, menurut Encyclopaedia Britannica adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan. Menurut Rozalinda, Teori sosialisme, keputusan tentang apa dan berapa banyak yang dihasilkan tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan laba. Keputusan ini akan tercapai atas dasar kegunaan barang bagi suatu masyarakat. Sebagai ganti kerja tenaga produktif secara membabi buta, maka terdapat perencanaan terpusat tentang kehidupan ekonomi negara

2. Ekonomi Pancasila

Pancasila merupakan dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (leitsar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan (Latif, 2011). Hakikat keberadaan Pancasila merupakan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain maupun hasil pemikiran seseorang ataupun beberapa orang (Tjakrawedaja, et al, 2019). Pancasila diartikan Swasono (2010) sebagai sikap budaya masyarakat Indonesia, ideologi, serta sistem kehidupan ekonomi berikutan dengan teknologinya dan memandang manusia Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh berarti mampu berpikir, bertindak, dan berbuat berdasarkan rangsangan ekonomi, faktor sosial, dan juga moral. Hal tersebut terurai dalam seluruh asas Pancasila sebagai berikut.

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa Sila ini menjadi dasar keyakinan religius masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan integral dalam totalitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak individu yang selalu diselaraskan dengan hak masyarakat dan hak negara sehingga tercipta kehidupan bangsa yang adil dan beradab.
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia Sila ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia disatukan berdasarkan paham kekeluargaan dan mengejawantahkan persatuan dalam keragaman, serta keragaman dalam persatuan.
- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila ini menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat Indonesia dan dilakukan musyawarah serta akal sehat sesuai dengan hati nurani untuk mencapai mufakat.

- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya kehidupan yang selaras antarwarganya, antara peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta selaras antara hak politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Latif, 2011).

Menurut Eva Nur Eviyana, dkk dalam buku Pancasila dan Tokoh Pahlawan Indonesia (2020), sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan lima sila Pancasila sebagai dasarnya. Sederhananya, ekonomi Pancasila bisa pula disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Dikutip dari buku Bangkitlah Pancasila!! (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) (2014) oleh Wimmy Halim, sistem ekonomi Pancasila dibangun dengan mengusung konsep kekeluargaan dan dijiwai oleh semangat gotong royong. Artinya sistem perekonomian ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia. Prinsip ekonomi Pancasila antara lain:

- a. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial,
 - b. Muncul kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, dengan tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial,
 - c. Semangat nasionalisme ekonomi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri,
 - d. Demokrasi ekonomi yang didasarkan pada kerakyatan dan kekeluargaan,
 - e. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi serta otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab
3. Society 5.0

Serpa (2018), Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada Manusia dan mengusulkan untuk “memajukan potensi hubungan individu dengan teknologi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup semua orang melalui masyarakat super pintar (super smart society).

Menurut Hayashi et al. (2017), dengan Society 5.0, Jepang berusaha untuk; “Menciptakan nilai-nilai baru dengan berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa sistem yang berbeda, dan merencanakan standarisasi format data, model, arsitektur sistem, dll. Dalam pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan. Selain itu, diharapkan bahwa peningkatan pengembangan properti intelektual, standarisasi internasional, teknologi konstruksi sistem IoT, teknologi analisis data besar, teknologi kecerdasan buatan dan sebagainya mendorong daya saing Jepang dalam “masyarakat super pintar”.

Menurut Keidanren (Japan Business Federation) (2016) menyajikan, sesuai tujuan Society 5.0 adalah agar “Setiap individu termasuk orang tua dan wanita dapat hidup aman dan terjamin kehidupan yang nyaman dan sehat dan setiap individu dapat mewujudkan gaya hidup yang diinginkannya”. Untuk tujuan mewujudkan Society 5.0 ini menurut Keidanren diperlukan sejumlah unsur mekanisme dalam pemerintahan masing-masing negara yaitu;

- a. Perumusan strategi nasional dan integrasi sistem komunikasi pemerintah,
- b. Pengembangan undang-undang menuju penerapan teknologi terbaru,
- c. Pembentukan landasan pengetahuan,
- d. Keterlibatan dinamis semua warga negara dalam ekonomi baru dan masyarakat,
- e. Integrasi teknologi dan masyarakat sangat penting.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci tentang fenomena yang terjadi dan menggambarkan gejala atau variable yang dijelaskan secara sistematis, faktualan aktual menegani fakta fakta, sifat dan hubungan ntara fenomena yang diamati. Peneliti melakukan pengamatan terhadap hubungan variable yang telah tercantum dalam penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti ingin mengamati atau meneliti tentang relevansi Pancasila era industry 4.0 dan society 5.0..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Seluk Beluk Ekonomi Sosialis vs Ekonomi Pancasila

Istilah sosialisme pertama kali ditemukan di Prancis pada tahun 1830, ketika terdapat keinginan agar alat-alat produksi dimiliki secara bersama untuk melayani semua kebutuhan masyarakat, bukan monopoli atas kaum kapitalis. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda oleh tiap golongan, namun pada umumnya adalah sistem ekonomi yang dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir orang-orang elit. Sistem ekonomi sosialis muncul ditengah-tengah revolusi Prancis dan revolusi industri dengan buah pemikiran Karl Marx. Karl Marx merupakan tokoh penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi sosialis terutama di Benua Eropa. Ekonomi sosialis menempatkan posisi negara sebagai sentral kegiatan ekonomi. Negara sangat berkuasa dalam kepemilikan bersama terhadap semua faktor produksi yang tersedia, produksi yang dilakukan oleh produsen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, serta perencanaan ekonomi yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Santoso, 2011). Sistem perekonomian sosialis tidak memiliki arti hilangnya hak individu dalam kegiatan ekonomi, individu tetap diberikan kebebasan yang terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan campur tangan

pemerintah yang cukup dominan.

Dalam ekonomi sosialis hak pribadi tidak akan diakui, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya, karena dalam ekonomi kapitalis dimana hak pribadi diakui sehingga menimbulkan keadaan dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pada negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoriter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan sekedar objek bagi pelaksana kegiatan ekonomi (Hidayat, 2014). Negara yang menganut sistem sosialis ini tidak mengakui hak pribadi sehingga menimbulkan kelangkaan kekayaan. Kekayaan dapat dicari dengan memberdayakan buruh untuk menjadi tenaga kerja untuk menghasilkan hasil produksi. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara lah yang menentukan segala kegiatan ekonomi, ketersediaan pun juga dipenuhi oleh negara. Tidak adanya pasar untuk menjadi tempat transaksi baik itu barang atau jasa, sehingga dalam kegiatan perekonomian negara penganut sistem ekonomi sosialis tidak terdapat permintaan dan penawaran. Adapun prinsip dasar aliran sosialis sebagai berikut:

- a. Keyakinan etis bahwa perekonomian harus diarahkan pada kesejahteraan segenap orang, bukan untuk keuntungan segelintir orang, sehingga sebagian besar alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara
- b. Sosialisme adalah bentuk cita-cita etis tentang masyarakat yang solider dengan tuntutan penghapusan hak pribadi c
- c. Setiap individu diberikan batasan dalam kegiatan ekonominya.
- d. Sumber ketidakadilan sosial adalah hak milik pribadi atas alat-alat produksi.

Istilah Sistem Ekonomi Pancasila muncul pertama kali diperkenalkan oleh sosok Emil Salim (Harahap, 1985, dalam Ismail dkk, 2014). Emil Salim menonjolkan penafiran sistem Ekonomi Pancasila ke dalam lima ciri, yaitu:

- a. Peranan negara dan aparatur adalah penting, namun perlu dicegah tumbuhnya sistem etatisme
- b. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal dan dominasi buruh
- c. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi Pancasila
- d. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat
- e. Sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai

Dalam sistem ekonomi Pancasila, konsep kepemilikan dilihat dalam empat bentuk, yaitu kepemilikan yang berada di tangan negara terkait dengan sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak, hak kepemilikan individu sebagai warga negara, kepemilikan swasta/privat, kepemilikan publik yang diakui dan berlaku dalam masyarakat khususnya yang

dalam masyarakat adat secara turun temurun dan dikategorikan sebagai rezim kepemilikan bersama. Sistem Ekonomi Pancasila memiliki beberapa kesamaan dengan Sistem ekonomi sosialis, namun dengan catatan bahwa dalam Sistem Ekonomi Pancasila, negara hanya menyusun dan merencanakan perekonomian secara nasional serta kebutuhan dasar rakyat dikendalikan oleh Negara.

2. Penerapan Ekonomi Pancasila di Indonesia

Indonesia dengan ideologi, dasar negara, bahkan setiap perilaku harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitupun dengan sistem ekonomi milik sendiri, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila diterapkan di Indonesia dalam beberapa lembaga yang akan disebutkan sebagai berikut:

- a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) BUMN yang merupakan lembaga negara yang mengelola sumber daya yang ada di Indonesia yang mana menguasai hajat hidup orang banyak, membuktikan bahwa negara menjamin kesejahteraan melalui ketersediaan yang dikelola oleh BUMN ini.
- b. Koperasi Koperasi merupakan wujud nyata dari konsepsi Sistem Ekonomi Pancasila yang selama ini diikuti oleh Indonesia. koperasi merupakan kegiatan usaha kolektif yang melibatkan kekeluargaan.
- c. Serikat Buruh Adanya serikat buruh menjadikan terjaminnya buruh yang ada di Indonesia, menjamin dari eksploitasi berlebihan.

3. Penerapan Nilai – Nilai Ekonomi Pancasila dalam Menghadapi Society 5.0

Pancasila yang juga sebagai dasar negara Indonesia sudah ditentukan oleh para pendiri bernegara, berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi pancasila saat ini, karena banyak ideologi luar yang muncul akan tetapi sebenarnya juga tidak akan mampu untuk menggantikan pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan catatan pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara untuk membuktikan bahwa pancasila merupakan ideologi yang sejati bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu tantangan di era perkembangan jaman terutama pada revolusi industry 4.0 dan society 5.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya kepribadian bangsa, akan tetapi untuk saat ini mengharuskan bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia, yang semakin kuat dengan dibarengani perkembangan teknologi yang pesat dengan acuan industry 4.0 dan Society 5.0. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri, kendati hidup ditengah-tengah pergaulan dunia. SDM yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, akan tetapi kemajuan tersebut juga menjadi suatu ancaman yang akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri dan juga tidak memiliki identitas diri. Hal ini sebenarnya sudah mulai terjadi karena terlihat banyaknya nilai-nilai Pancasila yang mulai diacuhkan. Dalam arus perkembangan teknologi saat ini dimana

setiap SDM harus memiliki kemampuan lebih untuk bersaing dengan dunia luar, rakyat dan bangsa Indonesia harus membuat suatu roadmap terkait implementasi Pancasila di berbagai bidang.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dunia luar, karena apabila tidak mengikuti perkembangan akan dipastikan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Bahkan, apabila kita melihat isu yang dulu menjadi pusat perhatian yaitu negara sosialis seperti Uni Soviet yang terkenal anti dunia luar tidak bisa bertahan dan terpaksa membuka diri dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang saat ini berlangsung. Maka konsep pembangunan modern harus membuat Indonesia membuka diri dan mengembangkan diri namun harus dengan landasan Pancasila. Hal tersebut merupakan upaya untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila agar dapat bersaing sehingga bangsa Indonesia bukan hanya menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan ketrampilan dari dunia luar, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Sifat dari Pancasila itu sendiri sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Selain itu, Pancasila yang berintikan gotong royong amat sesuai dengan tuntutan Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 yang mensyaratkan kolaborasi dalam mengembangkan usaha selain responsif terhadap teknologi. Pancasila merupakan dasar yang kuat dalam menjawab tantangan masa depan yaitu dunia usaha berbasis teknologi dan otomatisasi. Kolaborasi Pancasila perkembangan Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 akan menjadikan SDM Indonesia semakin kuat, karena perkembangan revolusi tersebut tidak akan lepas dengan keperluan kemampuan soft skill yang juga merupakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan representatif dari kemampuan soft skill yang dibutuhkan di perkembangan revolusi tersebut. Karena dalam kedua revolusi tersebut meskipun mengedepankan teknologi akan tetapi juga membutuhkan SDM yang profesional, sehingga untuk menjawab hal tersebut maka diperlukan dasar hard skill dan soft skill yang kompeten. Jadi salah satu langkah utama yang dapat dilakukan pendidikan pancasila yang ada dalam pendidikan tinggi vokasi harus diperbaiki terutama dalam pengelolaan dan penyampaian materi yang harus tersampaikan dengan baik, karena apabila terimplementasi dengan baik maka hal tersebut akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi Mahasiswa.

Kedatangan era society 5.0 pastinya bawa pengaruh pada anak muda, baik itu positif serta pula pengaruh negatif. Pengaruh- pengaruh tersebut tidak secara langsung mempengaruhi

terhadap nasionalisme. Tetapi secara totalitas bisa memunculkan rasa nasionalisme terhadap bangsa jadi menurun ataupun apalagi lenyap, Terdapatnya globalisasi menimbulkan perpindahan nilai serta anak muda yang semula irasional jadi, Globalisasi sanggup meyakinkan Anak muda Indonesia kalau liberalisme bisa membawa kemajuan serta kemakmuran, Anak muda kurang ingat hendak bukti diri diri selaku bangsa Indonesia sebab style hidupnya cenderung meniru budaya barat; perilaku individualistik yang memunculkan ketidakpedulian antarperilaku sesama masyarakat; dan kesenjangan social. Arus globalisasi tidak mungkin dapat dihentikan. Seiring berjalannya globalisasi tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penyebabnya penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindari. Bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesi, globalisasi memiliki dampak positif dan negative. Pembudayaan nilai-nilai luhur pada Pancasila perlu kita upayakan. Diharapkan dapat penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur pada Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. Peluang dan Tantangan Pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia dalam Era Society 5.0

Sejak tahun 2016, salah satu fokus pemerintah Indonesia adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini disusun sebagai pedoman langkah-langkah strategis bagi kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Perpres No. 82, 2016). Sejauh ini belum ada program dari pemerintah yang secara tersurat membahas langkah strategis menghadapi Era Society 5.0. Meski demikian, sejak tahun 2018, Indonesia sudah menyusun roadmap Revolusi Industri 4.0 melalui program Making Indonesia 4.0. Era Society 5.0 sendiri merupakan penyempurnaan dari Revolusi Industri 4.0 sehingga sebelum menilai kesiapan Indonesia dalam menghadapi Society 5.0, pelaksanaan Making Indonesia 4.0 perlu dievaluasi perkembangannya.

Beberapa perkembangan yang muncul di era Society 5.0 antara lain kemajuan di bidang teknologi seperti robotika, mobile dan digital, pencetakan 3D, dan internet of things bisa mengubah barang maupun layanan saat diproduksi, didistribusikan, dikirimkan, hingga dikonsumsi. Teknologi ini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, seperti perawatan kesehatan, perancangan dan manajemen infrastruktur, pendidikan, inklusi keuangan, partisipasi masyarakat sipil, berbagai jenis pekerjaan baru, hingga akuntabilitas pemerintah. Letak geografis Indonesia yang didominasi lautan dan terpisah ke dalam puluhan ribu pulau tidak akan lagi menjadi penghalang. Bahkan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kemampuan ekonomi. Kemudahan tersebut belum tentu dapat dirasakan dalam

waktu dekat secara merata karena ada beberapa tantangan dalam pencapaian Making Indonesia 4.0 dan kesiapan menghadapi Society 5.0. Salah satunya adalah infrastruktur yang masih belum merata, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan terdakang. Jika infrastruktur tidak merata, tidak menutup kemungkinan kesenjangan akan semakin melebar di Indonesia dan pencapaian Ekonomi Inklusif bisa melambat pencapaiannya. Tantangan berikutnya adalah kecepatan jumlah ahli teknologi belum sebanding dengan perkembangan teknologi baru. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pergeseran permintaan tenaga kerja. Akan ada beberapa pekerjaan yang hilang tetapi tidak sedikit muncul pekerjaan baru.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan karena saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk didominasi usia produktif. Hasil proyeksi penduduk BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 70,72% penduduk berada di usia produktif 15-64 tahun. Sedangkan persentase penduduk kategori lansia adalah 9,78%, baik 1,19% dibanding tahun 2010 (BPS, 2021). Jika masyarakat, terutama yang berusia produktif, tidak meningkatkan keterampilannya, kesenjangan bisa semakin melebar. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah tingkat pengangguran. Tantangan lain yang dihadapi antara lain adalah masalah keamanan teknologi dan komunikasi komunikasi, keandalan stabilitas produksi, serta ketidakmampuan pemangku kepentingan untuk berubah. Oleh karena itu, Society 5.0 perlu dipersiapkan dengan baik oleh seluruh lini

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem ekonomi adalah salah satu alat bagi suatu negara untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Salah diantaranya adalah ekonomi sosialis dan ekonomi pancasila. Keduanya memiliki satu arti yang sama namun dengan pelaksanaan yang berbeda, sama-sama dalam kegiatan masyarakatnya ada ikut campur pemerintah Negara. Namun, sistem ekonomi sosialis semua kegiatan perekonomian terpusat pada Negara dan dalam komando Negara. Rakyat tidak memiliki hak pribadi dan semua kebutuhan disediakan oleh Negara. Bertentangan dengan system ekonomi sosialis, sistem ekonomi Pancasila dimana Negara menyusun dan merencanakan apa yang harus dilakukan, serta tidak membatasi gerak masyarakat dan tetap berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Kegiatan perekonomian Indonesia yang merupakan penganut sistem ekonomi Pancasila dengan penerapannya pada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti BUMN, Koperasi, Serikat Buruh.

Relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomatisasi yang semakin canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

Munculnya era Society 5.0 dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Teknologi dapat membantu mempercepat berkurangnya ketimpangan, terutama dalam hal aksesibilitas serta mulai muncul beberapa pekerjaan baru. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti perawatan kesehatan, perancangan dan manajemen infrastruktur, pendidikan, inklusi keuangan, partisipasi masyarakat sipil, hingga akuntabilitas pemerintah. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain infrastruktur yang belum merata, risiko bertambahnya pengangguran karena adanya pekerjaan yang sudah tidak diperlukan lagi dan jenis pekerjaan baru belum dikuasai, serta adanya bonus demografi di mana jumlah usia produktif Indonesia sebanyak 70% di antara seluruh penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K.L. (2018). *Persaingan Industry 4.0 di ASEAN: Dimana Posisi Indonesia?*, Yogyakarta: Forbil Institute
- Atmawarni, A., & Kesuma, S. (2021). PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP PEMBINAAN MORAL REMAJA. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(1).
- Effendi, Syamsul. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*. 6(2), 147-158.
- Hidayat, Saleh. (2014). Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syariah): Komparasinya dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 4(1), 3–5.
- Kamiruddin, & Iddris Parakkasi. (2018). Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *LAA MAISYIR*. 5(1), 107-120.
- Lena Ellitan | Lina Anatan. (2020). Achieving Business Continuity in Industrial 4.0 and Society 5.0. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 4(2), 235–239
- Marlina, E. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Rasa Cinta Tanah Air pada Remaja di Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Psikoborneo*, 4(4), 564.
- Mujiatun, Siti. (2014). Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Analytica Islamica*. 3(1), 90-107.
- Nurwardani, P. (2016). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Cetakan 1.
- Pangiuk, Ambok. (2019). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. 4(2), 1–19.
- Putri, A. M., & Andrian, A. L. F. (2020). Pengaruh Media Sosial terhadap Nilai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Generasi Z. *Syntax Idea*, 2(12).
- Qomar, Moh. Nurul. (2019). Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi syariah Atas Buku *Das Kapital*, 1003–1009.
- Rojko, A. (2017). *Industry 4.0 Concept: Background and Overview*. ECPE European Center for Power Electronics e.V. Vol. 11.
- Nuremberg, Germany. Sharma, P. (2018). *Soft Skills-Personality Development For Life Success*. BPB Publications.
- Tjakrawedaja, Subiakto; Soedarno, Soenarto; Lenggono, P. Setia; Purwandaya, Budhi; Karim, Muhamad; Agusalm, L. (2019). *Sistem Ekonomi Pancasila (M. Zaelani (Ed.);2nd ed.)*.

- Rajawali Pers Wulandari, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Membumikan Pancasila Bagi Karakter Penerus Bangsa di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2018), 926–930. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1054>
- Zainab, M. S., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Nasionalisme bagi Warga Negara Indonesia. *Rhizome :Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora*, 1(3), 1–7.
- Zulhamidi & Edwar, E. (2016). Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI (Studi Kasus Program Studi di Politeknik ATI Padang), *Jurnal Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Tinggi*

